

SISKAMLING DIGITAL: MELAWAN INTOLERANSI MELALUI GERAKAN ANTI HOAKS

Nuril Hidayah,
vayarina@gmail.com
STAI Muhammadiyah Probolinggo

Abstract

Social media algorithm that moves its users to be part of homogeny digital communities leads them to echo chamber phenomena and rises artificial walls between the polarized digital groups of social media users. This polarization is then exacerbated by the spread of hoaxes which escalates hatred between the groups. The lack of diversity exposure within these homogeny digital groups and the significant rise of hatred then leads to intolerant practices in the real world. In line with those who promote positive internet ecosystem like Kemkominfo with its Siberkreasi programs, and MUI, MPI Muhammadiyah, and NU that have released Social Media Guide, Siskamling Digital movement which has been initiated by MAFINDO—an Indonesian voluntary network that has engaged in activities against fake news since 2016— and which is characterized by multipronged approach is a significant endeavor to suppress potential threats of intolerance fostered by bad digital ecosystem. This multipronged approach outlines three strategies which has been applied simultaneously: detect, counter, and prevent. This movement also involves people from different religion, profession, and political orientation who share the same vision namely to create positive internet ecosystem in order to build peaceful religious and political situation.

Keywords: *siskamling digital, anti-hoax movement, multipronged approach*

PENDAHULUAN

Dunia digital saat ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan sehari-hari. Dunia digital seperti dunia kedua di mana semua orang dapat membuat, menyampaikan, dan mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Akan tetapi, perkembangan teknologi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat. Central Connecticut State University tahun 2016 yang lalu merilis sebuah hasil riset yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking 60 dari 61 negara yang diuji tingkat literasinya

(<https://edukasi.kompas.com>). Padahal dalam hal tingkat konsumsi gadget Indonesia menempati ranking tertinggi (Airlanga, 2018:6).

Rendahnya tingkat literasi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan memilah konten-konten yang positif di antara banjir informasi di dunia maya. Di sisi lain, fenomena anonimitas di dunia digital juga membuat orang mudah terdorong untuk melakukan perilaku tak bertanggung jawab, seperti tindakan *hate speech*, produksi dan penyebaran hoaks, model-model penipuan *online*, dan sebagainya. Sebuah studi dalam ilmu sosial menunjukkan bahwa seseorang dapat bertindak lebih agresif ketika ia yakin tidak akan dikenali atau diketahui (Citron & Norton, 2011:1447). Ditambah lagi, algoritma media sosial turut mendorong berkembangnya homogenitas masyarakat di media sosial sehingga orang menjadi tidak terbiasa dengan perbedaan dan tidak terlatih melihat persoalan dari berbagai sisi. Homogenitas ini mengarahkan masyarakat pada kutub-kutub polarisasi yang saling bertentangan satu sama lain. Studi yang dilakukan Michela Del Vicario dkk. (2016) menunjukkan bahwa homogenitas sosial dunia maya merupakan pendorong utama mengapa disinformasi begitu mudah tersebar sehingga menyebabkan masyarakat terbelah dalam klaster-klaster yang terpolarisasi. Informasi yang keliru begitu mudah diterima karena dibawa oleh teman yang berasal dari *echo chamber* yang sama (Vicario, et. al, 2018: 558).

Situasi-situasi ini turut berkontribusi pada terciptanya *bad digital citizenship*, yaitu kondisi di mana kecakapan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital secara aman, efektif, dan bertanggung jawab sangat kurang. *Bad digital citizenship* sebagaimana tergambar pada situasi-situasi tersebut dapat mengancam kerukunan bangsa dan pada titik tertentu dapat mengakibatkan disintegrasi sosial, karena apa yang terjadi di dunia maya sangat berdampak pada interaksi sosial di dunia nyata. Aktivitas *online* dapat menimbulkan ancaman bagi partisipasi masyarakat di dunia nyata (Citron & Norton, 2011:1447)

Ditangkapnya beberapa oknum MCA awal 2018 ini merupakan contoh bagaimana hoaks dan *hate speech* di dunia maya mempengaruhi interaksi antar manusia di dunia nyata. Kasus ini sekaligus menunjukkan bagaimana kebencian antar kutub polarisasi yang dieskalasi oleh penyebaran hoaks menjadi pemicu tindakan-tindakan intoleran, mulai dari *bullying* dan *doxing* di dunia maya, hingga persekusi di dunia nyata. Pada tanggal 20 Maret 2018, SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression Network) merilis hasil pengamatannya terhadap aktivitas MCA di internet. Menurut pengamatan jaringan relawan tersebut, beberapa akun yang berafiliasi dengan MCA terlibat aktif dalam mengarahkan massa untuk melakukan persekusi kepada orang-orang yang mereka targetkan. Selain melakukan praktik *doxing*—yakni membuka data pribadi seseorang di dunia maya kepada publik agar kemudian

diburu dan dipersekusi di dunia maya maupun dunia nyata—MCA juga melangkah lebih jauh dengan cara membuat akun kloningan dari target mereka untuk kemudian diisi dengan konten-konten hoaks yang dapat memancing emosi massa. Contohnya adalah hoaks tentang pemilik akun twitter @parlindsinurat yang membakar Al-Qur'an untuk menghina Riziq Shihab yang diunggah pada akun kloningannya @palindsinurat_ yang dibuat oleh MCA (Juniarto, 2018: 3-7).

PEMBAHASAN

A. Popularitas Konservatisme Islam dalam Balutan Hoaks dan Disinformasi

Kasus-kasus persekusi di atas berawal dari momen Pilkada DKI 2017 yang membelah masyarakat ke dalam dua kutub yakni pendukung Ahok sebagai salah satu calon kepala daerah dan penentangannya. Hoaks dan *hate speech* mewarnai retorika politik di dunia maya sejak viralnya video editan yang membuat Ahok dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Video ini juga mendorong munculnya serentetan aksi massa yang disebut dengan Aksi Bela Islam (ABI). Meskipun aksi massa tersebut berlangsung damai dan aman, tercatat sejumlah tindakan intoleran yang terjadi baik di dunia maya ataupun nyata yang mengiringi Pilkada tersebut maupun ABI. Kasus penolakan menyalati jenazah pendukung Ahok (<https://m.detik.com/news/berita/3431691>) dan video anak-anak yang menyanyikan seruan membunuh Ahok (<https://cnnindonesia.com/nasional/20170525183615-20-217312>) adalah contoh-contoh praktik intoleran yang melingkupi suasana politik dan keagamaan di seputar Pilkada tersebut. Viralnya transkrip suatu percakapan media sosial yang membuat Riziq Shihab dilaporkan atas tuduhan pornografi juga semakin memanaskan suasana. Tercatat beberapa *hate speech* yang diarahkan pada Riziq Shihab mendorong terjadinya sejumlah kasus persekusi terhadap pendukung Ahok sebagaimana didokumentasikan oleh Koalisi Anti Persekusi (Juniarto, 2018: 3-7).

Di sisi lain, oleh banyak pemerhati masyarakat Islam, fenomena ABI dianggap sebagai indikasi kebangkitan konservatisme Islam menjadi otoritas keagamaan yang tidak lagi berada di pinggiran. Tingkat penerimaan terhadap konservatisme Islam yang bertambah secara signifikan telah mengarah pada populisme, dengan kata lain konservatisme sebagai *pop culture*. Ahmad Najib Burhani mencirikan konservatisme sebagai sikap yang terlalu memuja simbol agama serta lupa terhadap substansi, adanya kecenderungan anti-intelektualisme dan kebencian terhadap mereka yang berbeda. Burhani menghubungkan gejala ini dengan festival film Islam, *fashion show* pakaian Islami, perbankan syariah dan sebagainya. Hal-hal ini mengindikasikan

adanya pergeseran konservatisme yang tadinya merupakan sesuatu yang *out of date* kini menjadi *pop culture* yang berkolaborasi dengan kapitalisme. Pergeseran ini sekaligus menunjukkan adanya perubahan lain dalam perilaku masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah mengikuti kata-kata orang yang sesuai dengan persepsinya sendiri daripada mengikuti otoritas keagamaan *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah (Burhani, 2016:25).

Sejumlah penulis berusaha memberikan penjelasan mengapa pergeseran ini dapat terjadi. Rizky Alif Alvian, misalnya, menawarkan perspektif ekonomi politik. Popularitas konservatisme ini sebagian diakibatkan oleh dislokasi yang dialami oleh pluralisme dalam memberikan penjelasan yang memadai tentang ketimpangan ekonomi dan politik kepada masyarakat. Celah yang ditinggalkan oleh narasi pluralisme ini kemudian diisi oleh narasi populisme sayap kanan (Alvian, 2016: 53). Senada dengan penjelasan ini, menurut Abdul Gaffar Karim dan Longgina Novadona Bayo, peningkatan penerimaan sosial terhadap konservatisme ini adalah karena kelompok-kelompok ini menyentuh ruang kosong dalam pelayanan dasar umat yang belum terpenuhi (Karim & Bayo, 2016: 133).

Melengkapi penjelasan-penjelasan tersebut, saya ingin menempatkan pergeseran konservatisme ini dalam konteks ekosistem digital. Pertanyaan yang patut diajukan adalah kondisi-kondisi apa, misalnya, di dunia digital yang memungkinkan konservatisme ini semakin berkembang dan mengejawantah dalam bentuk wacana dan praktik intoleran? Selain algoritma dan anonimitas, terdapat suatu pengondisian yang disengaja untuk membuat masyarakat Islam selalu merasa sebagai pihak yang teraniaya sehingga harus melakukan perlawanan. Penjelasan Nadirsyah Hosen tentang hadits bahwa perang adalah tipu daya sangat relevan untuk dikemukakan di sini. Menurutnya, hadits ini dipakai oleh banyak pihak untuk menjustifikasi tindakan menyebar hoaks, mencaci-maki, memelintir fakta, memfitnah, meng-*hack* akun, menggoreng isu, dan memotong skrinsyut tanpa menyertakan konteks, bahkan mengancam dan membunuh. Hadits tersebut dioperasikan pertama-tama dengan menekankan bahwa umat Islam sedang diserang oleh kekuatan anti-Islam. Berbagai konflik di negara lain dijadikan sebagai bukti, tanpa menampilkan kompleksitas permasalahannya. Narasi tersebut kemudian dikontekstualisasikan di Indonesia dengan menganggap pemerintah sebagai *tja>ghu>t* yang merupakan antek asing. Narasi lain kemudian diajukan sebagai pendukung, misalnya bahwa ulama dikriminalisasi, dan diikuti dengan pemberian label ulama *su>* kepada tokoh-tokoh Islam yang tidak sependapat dengan narasi ini. Narasi-narasi tersebut dibangun dengan tujuan mengondisikan masyarakat dalam situasi perang melawan penindas yang kafir sehingga apapun termasuk tipu daya boleh dilakukan (Hosen, 2018).

Temuan-temuan MAFINDO yang diarsipkan pada situs www.turnbackhoax.id menguatkan penjelasan tersebut. Sepanjang tahun 2016 hingga awal 2018, dokumentasi MAFINDO menunjukkan banyaknya hoaks yang memanaskan beberapa isu sensitif terkait dengan interaksi antar agama, terutama isu Rohingya dan isu penyerangan ulama. Pada situs tersebut tercatat setidaknya 12 hoaks yang sebagian besarnya berupa foto-foto tragedi di tempat lain yang diklaim terjadi di Rohingya, sebagian kecil berupa video. Sisanya berupa disinformasi yang menguatkan anggapan bahwa Biksu Myanmar mendapatkan hukuman dari Tuhan atau bahwa umat Budhha Indonesia berpangku tangan atas tragedi Rohingya (www.turnbackhoax.id).

Menyusul tragedi Rohingya, terjadi sejumlah tindakan intoleran yang memengaruhi psikologi penganut Buddha terjadi di tanah air. Rencana demo memutihkan Borobudur adalah salah satunya (<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/14412611/>). Cerita lainnya adalah tentang pengusiran Bhante di Legok Tangerang yang dipicu oleh disinformasi bahwa Bhante ini akan mendirikan kuil untuk ibadah umat Buddha di area tersebut (<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/02/11/>) Usut punya usut, selain karena kesalahpahaman, ternyata pengusiran itu juga dipengaruhi oleh sentimen anti-Buddha akibat masyarakat mengonsumsi hoaks-hoaks berupa pemalsuan foto-foto korban tragedi Rohingya.

Terkait dengan isu penyerangan ulama, Polri mengungkapkan bahwa 42 dari 45 kabar yang beredar adalah hoaks (<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/03/05/>). Isu penyerangan ulama ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat hingga sempat terjadi kehebohan ketika ada seorang penduduk di Tangerang yang melihat goresan cat yang dianggapnya sebagai tanda akan dilakukan penyerangan. Penelusuran polisi membuktikan bahwa ternyata tanda itu dibuat oleh pendamping Pramuka SDN Babat 1 sebagai bagian dari kegiatan mencari jejak yang diikuti oleh anggota pramuka (<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/18/07404201/>).

Selain kedua isu viral di atas juga ada berbagai disinformasi yang disebarkan untuk menguatkan anggapan bahwa umat Islam sedang didiskriminasi. Contohnya seperti unggahan di akun Instagram @mediamuslimin yang berupa surat himbauan dari pengelola sebuah Mushalla di Bali agar umat Islam melaksanakan shalat di rumah pada hari Nyepi. Akun tersebut berusaha menyesatkan interpretasi dengan menambahkan *caption* "INI APAKAH TOLERANSI AGAMA? SAMPAI SHALAT DILARANG???" (<https://www.instagram.com/mediamuslimin/>).

Membaca konten contoh-contoh hoaks dan disinformasi di atas, sulit untuk tidak mengamini penjelasan Nadirsyah Hosen tentang pengondisian umat Islam dalam situasi perang. *War situationing* ini dapat menimbulkan

perasaan selalu sebagai korban (viktimisasi) hingga membuat pengidapnya merasa sah untuk melakukan apapun mulai dari memproduksi dan menyebarkan hoaks, hingga aksi-aksi kekerasan di dunia nyata.

B. Gerakan Anti-Hoaks sebagai Strategi

Bagian ini berusaha memberikan landasan-landasan rasional mengapa melawan intoleransi sangat penting untuk dilakukan melalui gerakan anti-hoaks. Ekosistem digital dengan karakter anonimitasnya dan algoritma media sosial menjadikan dunia maya sebagai lahan subur perilaku intoleran. Ekosistem digital, atau *cyberspace* dalam istilah Yasraf Amir Piliang, menganut sistem oposisi biner yang menjadikan penggunaanya memandang dunia dengan cara yang sama. Cara pandang ini pada gilirannya menjadikan *cyberspace* sebagai tempat terjadinya multiplikasi perbedaan (Piliang, tanpa tahun). Akan tetapi, selain sifat-sifat dasar dari ekosistem digital tersebut, membaca ulang uraian di atas, tampak bahwa hoaks memainkan peran yang sangat penting dalam menumbuhkan sikap intoleran, baik pada tataran wacana atau aksi, dengan cara memberikan alasan bagi tumbuhnya kebencian terhadap orang lain yang berbeda. Karena itu, untuk menekan timbulnya *digital hatred* ini, perlu dilakukan upaya melawan hoaks dengan cara menyajikan kontra-narasinya, yang dalam hal ini berupa fakta yang sebenarnya.

Akan tetapi, menyodorkan fakta kepada orang yang sudah terpapar hoaks nyatanya bukan suatu hal yang mudah. Naluri survival seseorang akan membuatnya bertahan jika ideologi yang merupakan bagian dari identitasnya ditantang. Malahan fakta yang disodorkan itu bisa jadi justru membuat keyakinannya semakin kuat. Kondisi ini disebut sebagai *backfire effect*. Mengatakan bahwa ada bagian yang salah dari informasi yang diterima seseorang akan menciptakan adanya ruang mental yang kosong dalam pikirannya. Jika ruang kosong itu tidak ditempati oleh fakta pengganti maka usaha klarifikasi itu malah bisa menjadi bumerang yang menjerumuskannya lebih jauh dalam persepsinya yang keliru (Cook, 2017:212). Karena itu, dalam upaya melawan intoleransi, selain menyodorkan fakta dan data, dalam upaya ini juga harus digunakan pendekatan khusus yang membuat seseorang yang intoleran merasa dalam golongan yang sama dengan pihak yang berusaha mengubahnya.

Bersamaan dengan massifnya penegakan hukum terhadap pelaku produsen dan penyebar hoaks oleh POLRI baru-baru ini, gerakan anti-hoaks pun tampaknya semakin merata. Anti-hoaks kini seakan menjadi kepentingan semua orang. Di mana-mana diadakan deklarasi dan kampanye anti-hoaks baik yang digagas oleh elemen pemerintah seperti Dinas Komunikasi dan Informatika dan POLRES di berbagai daerah maupun oleh elemen masyarakat seperti ormas maupun masyarakat umum. Bahkan FPI

(<https://news.okezone.com/read/2018/03/20/338/1875375/>) dan MCA asli—sebagaimana diistilahkan oleh Novel Bamukmin di acara Mata Najwa 21 Maret 2017—juga mendeklarasikan diri sebagai anti-hoaks.

Di berbagai daerah, Kemkominfo mengadakan program-program literasi digital dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat yang memiliki visi untuk mewujudkan ekosistem internet yang sehat. Program-program ini berada dalam rangkaian Gerakan Nasional Siberkreasi (<https://kominform.go.id/content/detail/10801/siaran-pers-no-184hmkominfo102017>). Sementara itu POLRES di berbagai daerah juga membentuk komunitas netizen anti-hoaks dan mengadakan deklarasi anti-hoaks bersama dengan komunitas lintas agama. Dari elemen ormas, MPI Muhammadiyah dan NU mendukung Pedoman Bermedia Sosial yang dirilis oleh MUI. MPI Muhammadiyah merilis *Akhlaq Medsos* (<http://www.nu.or.id/post/read/74400>) sedangkan NU merilis *fiqh medsos* (<http://www.nu.or.id/post/read/74400>). Momentum di mana gerakan anti-hoaks telah menjadi kepentingan banyak pihak ini akan sangat berdampak jika dimanfaatkan untuk menyatukan semua pihak dalam program-program anti-hoaks yang dilaksanakan secara terstruktur dan dengan strategi yang tepat.

C. MAFINDO dan Siskamling Digital sebagai Pendekatan *Multipronged* dalam Melawan Hoaks

MAFINDO merupakan akronim dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. MAFINDO adalah komunitas relawan yang berfokus pada gerakan anti hoax. Komunitas ini berasal dari gerakan *online* yang kemudian bertransformasi menjadi gerakan *online-offline*. Berawal dari forum diskusi di Facebook FAFHH (Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax) yang dibuat tanggal 8 September 2015, anggota-anggota forum tersebut bersepakat untuk membuat suatu wadah berbadan hukum yang menaungi semua komunitas anti-hoaks. Pada tanggal 19 November 2016, berdasarkan SK (Surat Keputusan) Pendirian Perkumpulan NOMOR AHU0078919.AH.01.07. Tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbentuklah perkumpulan relawan bernama MAFINDO yang dideklarasikan tanggal 8 Januari 2017 di Jakarta. Kini MAFINDO berkantor di Freeware Spaces Kemang, Jl. Bangka XII No. 4 Rt 02/Rw 07 Pela Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12720, dan memiliki situs www.turnbackhoax.id. MAFINDO di FAFHH memiliki lebih dr 50 ribu member dan lebih dari 200 relawan *offline* yang tersebar di lebih dari 18 kota di Indonesia (SK NOMOR AHU0078919.AH.01.07 Tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹).

Pada tanggal 21 Maret 2018 di acara Mata Najwa Trans7, Ketua MAFINDO Septiaji Eko Nugroho mengatakan bahwa MAFINDO melawan hoaks dengan melakukan Siskamling Digital yang diaplikasikan pendekatan

multipronged yaitu melaksanakan strategi *detect*, *counter*, dan *prevent* secara simultan. Yang dimaksud dengan *detect* adalah kemampuan mendeteksi hoaks dan lokasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan *counter* adalah kemampuan memberikan kontra-narasi terhadap hoaks, yaitu fakta itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan *prevent* adalah kemampuan mencegah hoaks dengan cara melakukan edukasi literasi digital dan mengintensifkan upaya-upaya silaturahmi yang dapat menghancurkan dinding-dinding artifisial yang disebabkan oleh fenomena *echo chamber*.

Pendekatan berskema trisula tersebut terejawantahkan dalam empat pilar program MAFINDO yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Hasil observasi dan studi dokumen *Company Profile* MAFINDO):

1. *Factchecking*

Kegiatan ini dilakukan di FAFHH dengan cara mengklarifikasi informasi yang menyesatkan baik itu hoaks, disinformasi, atau misinformasi. Hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Disinformasi adalah penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain. Misinformasi adalah penyampaian informasi yang salah secara tak disengaja. Perbedaan hoaks dengan disinformasi: hoaks peristiwanya tidak ada/tidak terjadi, disinformasi peristiwanya ada/terjadi tetapi narasi tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya (<https://www.facebook.com/groups/fafhh/announcements/>). Hasil klarifikasi tersebut kemudian diarsipkan di situs www.turnbackhoax.id.

Hoax Buster Tools juga merupakan salah satu *output* dari pilar utama ini. Aplikasi berbasis android ini diciptakan oleh Tim IT MAFINDO dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mengecek kebenaran suatu informasi secara mandiri dengan memanfaatkan *tools* yang ada pada aplikasi tersebut. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2018 dan diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Borobudur Magelang Jawa Tengah. Produk MAFINDO yang lain adalah Yudhistira, yaitu aplikasi klarifikasi fakta yang diperuntukkan bagi para jurnalis yang tergabung dalam AMSI (Aliansi Media Siber Indonesia) dan juga Tim IT MAFINDO (<https://www.facebook.com/Abu.Muhammad.AJawy/posts/2124261001151649>). Pada level internasional MAFINDO juga pernah diundang oleh Parlemen Singapura untuk menceritakan tentang upaya penanganan penyebaran hoaks di Indonesia (<http://mediaindonesia.com/read/detail/147235-parlemen-singapura-belajar-antihoax-kepada-indonesia>).

2. Edukasi

Mafindo berperan aktif meningkatkan ketrampilan literasi digital masyarakat melalui kegiatan-kegiatan *workshop*, seminar, *talkshow* di sekolah, kampus, pesantren atau melalui berbagai media seperti televisi, radio, media massa baik online maupun cetak. Selain itu edukasi juga dilakukan dengan

public campaign di Car Free Day di berbagai kota di mana relawan MAFINDO berada.

3. Advokasi

Mafindo mengajak beberapa pihak untuk duduk bersama dan bersinergi untuk membangun satu visi dalam memerangi hoaks. Sejauh ini MAFINDO telah membuat MOU dan bekerjasama dengan banyak pihak seperti Kemkominfo, POLRI, pengelola media sosial seperti Google dan Facebook, IDI, OJK, Yayasan Kanker Infonesia, AJI, SPAK, dan sebagainya (Wawancara dengan Ketua MAFINDO Septiaji Eko Nugroho, 2017).

4. Silaturahmi

Dengan tetap independen dan netral Mafindo mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang profesi, suku, orientasi politik, dan agama untuk bersama-sama menciptakan ekosistem internet yang sehat dengan cara memperbanyak tatap muka (Wawancara dengan Ketua MAFINDO Septiaji Eko Nugroho, 2017).

SIMPULAN

Sifat ekosistem digital yang memungkinkan adanya anonimitas, dan algoritma yang mendorong terbentuknya kelompok2 masyarakat yang homogen, serta produksi dan penyebaran hoaks telah bersama-sama berkontribusi meningkatkan skala kebencian sehingga mendorong konservatisme mewujud dalam wacana dan aksi-aksi intoleran. Karena pentingnya penerangan hoaks dalam hal ini maka sangat penting dan strategis bagi kita untuk melakukan upaya melawan intoleransi melalui gerakan anti-hoaks.

Mengingat bahwa bisnis hoaks merupakan kejahatan yang terorganisir maka upaya melawannya juga harus menggunakan pendekatan yang strategis dan program-program yang terstruktur. Mafindo adalah salah satu contoh jaringan relawan yang sejak tahun 2016 konsisten melaksanakan program-program semacam itu. Berbeda dengan kepolisian yang memiliki fokus dan wewenang penegakan hukum, atau Kemkominfo yang memiliki wewenang untuk membatasi ruang gerak produsen dan penyebar hoaks, Mafindo memusatkan perhatiannya pada upaya klarifikasi fakta, diseminasi hasil-hasil klarifikasi tersebut, dan edukasi literasi digital. Upaya-upaya ini merupakan pengejawantahan pendekatan multipronged (skema trisula) yang terdiri dari detect, counter, dan prevent. Sebagai rekomendasi, cara2 yang ditempuh oleh Mafindo ini dapat diadopsi sebagian atau keseluruhannya, dan dikembangkan sedemikian rupa oleh institusi2 pendidikan agar upaya perlawanan terhadap hoaks, demikian juga intoleransi dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Airlanga, Mathew. 2018. *Indonesia Digital Landscape 2018*. (GDP Venture, 2018)
- Alvian, Rizky Alif. 2016. Ekonomi-Politik Aksi Bela Islam: Pluralisme dalam Krisis?" dalam *Jurnal Ma'arif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. II, No. 2, Desember 2016. Jakarta: Ma'arif Institute for Humanity
- Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan" dalam *Ma'arif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. II, No. 2, Desember 2016. Jakarta: Ma'arif Institute for Humanity
- Citron, Danielle Keats dan Norton, Helen. 2011. "Intermediaries and Hate Speech: Fostering Digital Citizenship for Our Information Age" dalam *Boston University Law Review*, Vol. 91. Heinonline
- Cook, John. 2017. "Understanding and Countering Climate Science Denial" dalam *Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales*, vol. 150, part 2
- Del Vicario, Michela dkk. 2016. "The Spreading of Misinformation Online" dalam *PNAS*, Vol. 113, No. 3, Januari 2016
- Hosen, Nadirsyah, "Memahami Hadits Perang itu Tipu Daya: Bolehkah Menyebar Hoax?" dalam <http://nadirhosen.net/kehidupan/negara/memahami-hadits-perang-itu-tipu-daya-bolehkah-menyebarkan-hoax>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018
- Juniarto, Damar, "Memindai Aktivitas MCA dalam Kontestasi Sosial-Politik di Indonesia" (Laporan—SAFENET, 20 Maret 2018)
- Karim, Abdul Gaffar dan Bayo, Longgina Novadona. 2016. "Ummat, Warga dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar" dalam *Ma'arif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. II, No. 2, Desember 2016. Jakarta: Ma'arif Institute for Humanity
- Piliang, Yasraf Amir, "Digitalisasi dan Multiplikasi Perbedaan: Konsep Difference dalam Cyberspace", *artikel*, tidak dipublikasikan
- Dokumen *Company Profile* MAFINDO
- Surat Keputusan Pendirian Perkumpulan NOMOR AHU0078919.AH.01.07. Tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

<https://cnnindonesia.com/nasional/20170525183615-20-217312>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

<https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

<https://www.facebook.com/groups/fafhh/announcements/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

<https://www.facebook.com/Abu.Muhammad.AJawy/posts/2124261001151649>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

<https://www.instagram.com/mediamuslimin/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018

<https://kominform.go.id/content/detail/10801/siaran-pers-no184hmkominfo102017>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018

<http://mediaindonesia.com/read/detail/147235-parlemen-singapura-belajar-antihoax-kepada-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Maret 2018

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/18/07404201/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018

<https://m.detik.com/news/berita/3431691>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/03/05/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018

<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/02/11/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018

www.muhammadiyah.or.id/id/download-lainlain-1156.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2018

<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/02/11/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/14412611/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/14412611/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018

<https://news.okezone.com/read/2018/03/20/338/1875375/>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018

<http://www.nu.or.id/post/read/74400>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018